

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 17 Nomor 1, Maret 2023: 1-110
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Kepala Editor	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Dewan Redaksi	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Redaktur Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P 5. B. Lora Christyanti, S.I.P 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si. 8. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini.

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
   Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
3. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
   Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6. Prof. Dr. Hj Mohd Rizal B. Hj Mohd Yaakop
   Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
   Universiti Kebangsaan Malaysia
7. Prof. Simon Butt, BA, LL.B., Ph.D.
   Pusat Hukum ASEAN dan Pasifik,
   The University of Sydney, Australia
8. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
   Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Dr. Ricca Anggraeni S.H., M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Pancasila
10. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH., M.Kn., LL.M.
    Fakultas Hukum Universitas Udayana
11. Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum.
    Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
12. Muhammad Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
    Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
13. Prakoso Bhairawa Putra, S.I.P., MA.
    Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H.
    Sekolah Hukum Leiden, Universitas Leiden, Belanda
15. Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H.
    Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
16. Darwance, S.H., M.H.,
    Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

DAFTAR ISI

1. Penguatan Posisi Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Narapidana 1-12
Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Penilai Nilai Ekonomi dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia 13-24
Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y.
3. Disparitas Sistem Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 25-40
Dista Dewi Rahayu, Ridwan Arifin, Luby Lukman Zakaria
4. Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan terhadap Pembentukan BRIN 41-54
Willy Wibowo
5. Penalaran Hukum: Bagaimana Merk Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum 55-68
Zakki Adlhiyati, Achmad
6. Kebijakan Peningkatan PNBP Dalam Pelayanan Publik di Bidang Keimigrasian 69- 80
Raden Natanegara Kartika Purnama, Muhammad Arief Adillah, Cahyoko Edi Tando
7. Penataan Penafsir Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris untuk Para Penghadap yang Tuna Rungu 81-96
Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
8. Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Keadaan Darurat 97-110
Denis Kurniawan

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi pertama pada bulan Maret 2023. Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang Penguatan Posisi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Melalui Fungsi Pelayanan Narapidana; LKMN sebagai Penentu Nilai Ekonomi Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia; Disparitas Sistem Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia 2011; Penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam Perspektif Undang-Undang Tata Negara Darurat; Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan Pembentukan BRIN; Pengaturan Penerjemah Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris untuk Para Penghadap yang Tuna Rungu; Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum; Kebijakan Pelayanan Publik Keimigrasian Yang Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal.

Volume 17 Nomor 1, Maret 2023

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System through the Function of Prisoner Services

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi

Changes in the Correctional System in Indonesia are marked by the ratification of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. One of the things that are regulated is regarding the implementation of prison services as a correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process, because juridically the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the raltionship between the regulation of prison services and the integrated criminal justice system in Indonesia. The discussion and analysis of this research uses a normative juridical method with a legal and conceptual approach, especially regarding the Correctional System and the integrated criminal justice system. The results of the analisys show that there are clear arrangements regarding the implementation of prison services as a correctional function. This is a form of legal certainty and at the same time an affirmation of the existence of correctional facilities as a criminal justice subsystem. As part of the Integrated criminal justice system, correctional facilities do not only work in the final process of the criminal justice process through the function of development prisoners, but also during the work or the on going criminal justice process.

Keywords: *Strengthening; Correctionals Facilities; Criminal Justice System; Prisoners Services*

The National Collective Management Institute (LMKN) as an Appraiser Of Economic Value in The Binding of Music and Song Copyrights as Objects Offiduciary Guarantees

Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y.

One of the creations protected by copyright is songs and/or music. Legal protection for them is a necessity in order to create a conducive climate to the development of music industry in Indonesia. In order to facilitate song and/or music writers with better control over their works, they can appoint representatives to regulate the management of their royalty, in this case LMKN (The National Collective Management Institute). Law number 28 of 2014 concerning copyrights regulates that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. However, its use is still hampered by the fact that the economic value of music and song copyrights cannot be determined easily, especially if it is used for fiduciary guarantee. Most banks do not accept it for loan collateral. The objective of this research was to analyze the roles of LMKN as the determiner of the economic values of song and music copyrights for the purpose of binding them for objects of fiduciary guarantee. This normative study uses statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and futuristic approach. The determination of the economic values of song and music copyrights can be done by LMKN, a one-stop service institution that collects the royalty of music and song in Indonesia. The National Collective Management Institute (hereinafter briefly referred to as LMKN) as an institution that can provide an appraiser of the economic value of Music and Song Copyrights. The use of SILM (a music and song information system and data center) can help the estimation of music and song's economic value based on the royalty accepted by the art's creator or copyright holder. The amount of royalty can determine the binding of music and song copyrights for the objects of fiduciary guarantee.

Keywords: *Appraiser; Copyright, Economic Value; Fiduciary Guarantee; LMKN*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Criminal System Disparity in The Indonesian Immigration Law 2011

Dista Dewi Rahayu, Ridwan Arifin, Luby Lukman Zakaria

The Criminal Provisions in Indonesian Immigration Law of 2011 are designed as acts of legislation for preventing transnational organized crimes in Indonesia. This law has existed for more than 10 years and has been no critical evaluation of the immigration criminal provisions. The construction of the criminal system has a non-uniform pattern of penal policy formation. This research employed the doctrinal research method with deductive reasoning that analyzed Articles on immigration criminal provisions from the perspective of Jeremy Bentham's theory of punishment analyzing the quality of criminal Articles. The results indicate that there are reactive and not pre-empting immigration criminal provisions, poor criminal provisions during immigration examinations, disparities in Judge's decisions at courts, varied patterns of punishment and sanctions, and inconsistency of criminal liability arrangements against corporations. Reconstruction of immigration criminal Articles is urged to achieve Bentham's principles and objectives of the law in sentencing. Criminal Articles should be dominated to prevent cross-border crimes during immigration clearance.

Keywords: *Criminal Disparity; Immigration Law; Criminal Provision*

A Concept of The Needs of The Ministry's Internal Policy Agency for The Policy Response to The Formation of Brin

Willy Wibowo

The current Government policy that integrates all Research and Development Agencies in Ministries and Institutions demands that these agencies must be transformed. To be able to answer various strategic issues and anticipate demands that come from the internal and external environment is the basis for an organization to organize and evaluate internally. Proposed organizational arrangements in this case must have a clear basis and contain analysis of the various aspects needed. The purpose of this scientific work is to provide a concept for transforming a research and development Agency into an internal Policy Agency to avoid duplication of duties and functions in existing Research Agencies. This study uses the policy review type method which is focused on reviewing documents. The need for an Internal Policy Agency at the Ministries/Agencies level is currently very urgent because of the diverse and complex fields of work and to produce quality policies and can be measured by the Policy Quality Index. There are several suggestions for Ministries/Institutions that will form an Internal Policy Agency, among others, transformation must be based on evidence-based needs.

Keywords: *Organizational Structure; Government Research and Development Institute; Structuring and Strengthening Organizations; Bureaucratic Reform*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Legal Reasoning: How Well-Known Marks Are Positioned Through Legal Positivism

Zakki Adlhiyati, Achmad

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court's decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges' rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of "Starbucks" and Pierre "Cardin". This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges' decisions and literature review. Therefore, knowing the judge's rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff's documented evidence was insufficient to establish the respondent's bad faith, but the judge's justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.

Keywords: *Pierre Cardin; Starbucks; Well-Known Mark*

Policy for Increasing PNBP in Public Services in The Immigration Sector

Raden Natanegara Kartika Purnama, Muhammad Arief Adillah, Cahyoko Edi Tando

One of the non-tax revenues in Indonesia is generated by services at Immigration Sector which is currently showing significant changes and activities. Public services provided to all citizens must be excellent and in line with the needs of the community itself. This study used a Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA Method which also searched for articles using Scopus and ScienceDirect database because those have good reputable nationally and internationally by academics. The study resulted in 2 (two) policies in Immigration through analysis of the results of the search for the article. The first is to improve developing immigration services and the latest innovations from digital Immigration and to promote a humanist approach and accountability for its services and ease of access given. Moreover, monopoly on human resources at Immigration is currently carried out in vital cooperation due to national security and state policy especially related to intelligence analysis. Meanwhile, cooperation with other parties is limited to providing space, education in terms of increasing human resources, and cooperation to exchange information with certain parties. The conclusion of this study led to 2 research results, which are policies to improve services and policies to strengthen immigration. The suggestions for future research are in-depth field research using qualitative or quantitative method on immigration agencies and other contributive factors to state revenue.

Keywords: *excellent service; human resources; immigration; public service*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Arrangement Of Sign Language Interpreters in The Creation of Authentic Deeds by Notaries for Deaf People

Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari

The writing aims to analyze the arrangements of sign language interpreters in making authentic deeds by Notaries for deaf people in Indonesia, analyze relevant arrangements on these issues for the provision of sign language interpreters by Notaries for deaf people in the future. The benefits of writing provide juridical understanding related to the arrangement of providing sign language interpreters in making authentic deeds by Notaries for deaf people in Indonesia and providing scientific contributions in the dimensions of Notary Law. The void of norms underlies writing using normative types of legal research through statutory and comparative approaches analyzed with descriptive, comparative, argumentative, and prescriptive techniques. The results showed that the authority of Notaries to make authentic deeds is contained in Article 15 paragraph (1) of the Amendment Notary Position Law. The arrangement is intended for those with non-disabled conditions only because it contains a clause "self-explanatory." Based on a comparative study of the Amendment Notary Position Law with the Japanese Notary Law, the Amendment Notary Position Law has not regulated the provision of sign language interpreters for deaf people, while the Japanese Notary Law has regulated sign language interpreters. Solving the urgency of this problem by formulating the arrangement of sign language interpreters in the Amendment Notary Office Law by adopting the provisions contained in the Japanese Notary Law.

Keywords: *Authentic Deed; Sign Language Interpreter; Notary; Deaf People*

The Relevance of Postponing The 2024 General Election From The Perspective of The State of Emergency

Denis Kurniawan

Discourse on postponing the elections in 2024 was circulated amid the ongoing Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, which conceptually could be classified as a civil emergency in Indonesia. The discourse was brought up by a certain group of political elites and received various responses in the community, from those who approved to those who rejected the idea. This paper describes the implementation of the 2024 elections in the context of the state of emergency, as a branch of the scientific study of constitutional law that discusses the state when it is faced with abnormal conditions, aka emergencies due to dangers that threaten the continuity of the nation and state. This paper uses normative legal research conducted using a statutory and conceptual approach which will later assess whether the postponement of the election can be justified from the point of view of the state of emergency, and by looking at the implications of the current danger of Covid-19 supported by policies that there is from the government, as well as the election management body itself, namely the General Elections Commission.

Keywords: *Implementation; General Elections; State of Emergency*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Penguatan Posisi Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Narapidana

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi

Perubahan sistem pemasyarakatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan ini tentu saja menarik untuk dianalisis karena selama ini pemasyarakatan hanya identik dengan pembinaan narapidana yang merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan pada Rutan adalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yang sedang berlangsung, karena secara yuridis tanggungjawab penahanan masih pada lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan. Tulisan ini bertujuan menganalisis kaitan pengaturan pelayanan tahanan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual khususnya mengenai sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana terpadu. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan. Hal Ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dan sekaligus penegasan keberadaan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana terpadu. Sebagai bagian sistem peradilan pidana, pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada akhir dari rangkaian proses peradilan pidana melalui fungsi pembinaan narapidana dan anak pidana, tetapi juga pada saat bekerjanya atau berlangsungnya proses peradilan pidana tersebut.

Kata Kunci: Penguatan; Pemasyarakatan; Sistem Peradilan Pidana; Pelayanan Tahanan

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Penilai Nilai Ekonomi dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y.

Salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Perlindungan hukum bagi mereka merupakan suatu keniscayaan guna menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri musik di Indonesia. Untuk memudahkan pencipta lagu dan/atau musik agar dapat lebih menguasai karyanya, mereka dapat menunjuk perwakilan untuk mengatur pengelolaan royaltinya, dalam hal ini LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun penggunaannya masih terkendala oleh kenyataan bahwa nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu tidak dapat ditentukan dengan mudah, apalagi jika digunakan untuk jaminan fidusia. Sebagian besar bank tidak menerimanya untuk agunan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LMKN sebagai penentu nilai ekonomi hak cipta lagu dan musik untuk tujuan pengikatan objek jaminan fidusia. Kajian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan futuristik. Penetapan nilai ekonomi lagu dan hak cipta musik dapat dilakukan oleh LMKN, sebuah lembaga pelayanan satu atap yang menghimpun royalti musik dan lagu di Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN) adalah lembaga yang dapat memberikan penilaian nilai ekonomi Hak Cipta Musik dan Lagu. Pemanfaatan SILM (sistem informasi dan pusat data musik dan lagu) dapat membantu estimasi nilai ekonomi musik dan lagu berdasarkan royalti yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Besaran royalti dapat menentukan pengikatan hak cipta musik dan lagu terhadap objek jaminan fidusia.

Kata kunci: Penilai; Hak Cipta, Nilai Ekonomi; Jaminan Fidusia; LMKN

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Disparitas Sistem Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011
Dista Dewi Rahayu, Ridwan Arifin, Luby Lukman Zakaria

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 dirancang sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Undang-undang ini telah ada selama lebih dari 10 tahun dan belum terdapat evaluasi kritis terhadap ketentuan pidana keimigrasian. Konstruksi sistem pidana memiliki pola pembentukan kebijakan pemidanaan yang tidak seragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan penalaran deduktif yang menganalisis pasal-pasal ketentuan pidana keimigrasian dari sudut pandang teori pemidanaan Jeremy Bentham yang menganalisis kualitas pasal-pasal pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan pidana keimigrasian yang reaktif dan tidak dimaksudkan sebagai Tindakan pencegahan, ketentuan pidana yang kurang baik selama pemeriksaan keimigrasian, disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, dan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian didesak untuk mencapai prinsip-prinsip Betham dan tujuan tujuan hukum dalam penjatuhan pidana. Pasal-pasal Pidana harus didominasi untuk mencegah kejahatan lintas batas selama pemeriksaan imigrasi.

Kata Kunci: Disparitas Pidana; Hukum Keimigrasian; Ketentuan Pidana

Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan terhadap Pembentukan BRIN

Willy Wibowo

Kebijakan Pemerintah saat ini yang mengintegrasikan seluruh Badan Litbang di Kementerian dan Lembaga menuntut agar badan-badan tersebut harus bertransformasi. Mampu menjawab berbagai isu strategis dan mengantisipasi tuntutan yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal merupakan dasar bagi suatu organisasi untuk menata dan mengevaluasi secara internal. Susunan organisasi yang diusulkan dalam hal ini harus memiliki landasan yang jelas dan memuat analisis dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk memberikan konsep transformasi Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan internal agar tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi pada Badan Litbang yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode jenis review kebijakan yang difokuskan pada review dokumen. Kebutuhan Badan Kebijakan Internal di tingkat Kementerian/Lembaga saat ini sangat mendesak karena bidang kerja yang beragam dan kompleks serta untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dapat diukur dengan Indeks Kualitas Kebijakan. Ada beberapa saran bagi K/L yang akan membentuk Badan Kebijakan Internal, antara lain transformasi harus berdasarkan kebutuhan berbasis bukti.

Kata kunci: Struktur Organisasi; Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; Penataan dan Penguatan Organisasi; Reformasi Birokrasi

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Penalaran Hukum: Bagaimana Merk Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum

Zakki Adlhiyati, Achmad

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal perlu dikaji. Indonesia telah mencoba menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum internasional, terutama Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Namun, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa merek terkenal itu tetap tidak disukai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran hakim ketika menolak gugatan terhadap merek terkenal di Indonesia yang merupakan sengketa merek "Starbucks" dan Pierre "Cardin". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dan mengkaji bahan hukum dari putusan hakim dan kajian literatur. Oleh karena itu, mengetahui alasan hakim untuk menolak gugatan itu penting. Dalam kasus pertama, bukti terdokumentasi penggugat tidak cukup untuk menetapkan itikad buruk tergugat, tetapi pembenaran hakim untuk menolak gugatan juga tidak cukup. Sedangkan pada kasus kedua, hakim menolak gugatan berdasarkan *nebis in idem*, yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga hakim dapat lebih condong ke positivisme. Positivisme membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Namun, undang-undang merek dan indikasi geografis tidak memberikan pengaturan yang lengkap tentang merek terkenal. Akibatnya, masalah dan konflik sering muncul dalam praktik ketika menyangkut perlindungan merek terkenal.

Kata kunci: Pierre Cardin; Starbucks; Markus Terkenal

Kebijakan Peningkatan PNBP Dalam Pelayanan Publik di Bidang Keimigrasian

Raden Natanegara Kartika Purnama, Muhammad Arief Adillah, Cahyoko Edi Tando

Salah satu PNBP di Indonesia dihasilkan oleh pelayanan di Bidang Keimigrasian yang saat ini menunjukkan perubahan dan kegiatan yang cukup signifikan. Pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh warga negara harus prima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan Metode PRISMA yang juga mencari artikel menggunakan database Scopus dan ScienceDirect karena memiliki reputasi yang baik secara nasional dan internasional oleh akademisi. Kajian tersebut menghasilkan 2 (dua) kebijakan di bidang Keimigrasian melalui analisis hasil penelusuran pasal tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan perkembangan layanan keimigrasian dan inovasi terbaru dari Imigrasi digital serta mengedepankan pendekatan humanis dan akuntabilitas pelayanan serta kemudahan akses yang diberikan. Apalagi, monopoli sumber daya manusia di Keimigrasian saat ini dilakukan dalam kerjasama yang vital karena keamanan nasional dan kebijakan negara terutama terkait dengan analisis intelijen. Sedangkan kerjasama dengan pihak lain terbatas pada penyediaan ruang, pendidikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama pertukaran informasi dengan pihak tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan 2 hasil penelitian yaitu kebijakan peningkatan pelayanan dan kebijakan penguatan keimigrasian. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian lapangan yang mendalam dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif pada agen keimigrasian dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Kata kunci: pelayanan prima; sumber daya manusia; imigrasi; pelayanan publik.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Penataan Penafsir Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris untuk Para Penghadap yang Tuna Rungu

Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari

Penulisan bertujuan menganalisis pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, menganalisis pengaturan yang relevan mengenai persoalan tersebut atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Manfaat penulisan memberikan pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Hukum Kenotariatan. Kekosongan norma melandasi penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, komparatif, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Notaris membuat akta otentik termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Pengaturan tersebut ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas saja karena memuat klausula "cukup jelas." Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang, maka UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu, sedangkan UU Notaris Jepang telah mengatur perihal juru bahasa isyarat. Penyelesaian urgensi atas problematika ini dengan merumuskan pengaturan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dengan mengadopsi ketentuan yang termuat dalam UU Notaris Jepang.

Kata Kunci: Akta Otentik; Juru Bahasa Isyarat; Notaris; Penghadap Tunarungu

Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Keadaan Darurat

Denis Kurniawan

Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia. Wacana tersebut dilontarkan oleh sekelompok elit politik tertentu dan mendapatkan respon yang beragam di tengah masyarakat, dari yang menyetujuinya hingga menolak gagasan tersebut. Tulisan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu 2024 dalam konteks hukum tata negara darurat, sebagai cabang kajian keilmuan dari hukum tata negara yang membahas negara ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak normal alias darurat dikarenakan adanya bahaya yang mengancam jalannya keberlangsungan bangsa dan negara. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang nantinya akan menilai apakah penundaan pemilu tersebut dapat dibenarkan dalam sudut pandang hukum tata negara darurat, serta dengan melihat implikasi dari bahaya Covid-19 saat ini dengan didukung dengan kebijakan yang ada dari pemerintah, serta lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Pemilihan Umum; Hukum Tata Negara Darurat